



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN RISTEK, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021.
Masa Sidang	: V (Kelima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Fisik dan Virtual)
Dengan	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 3 Juni 2021.
Pukul	: 09.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI dan Virtual menggunakan Zoom
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM./ Wakil Ketua Komisi X DPR RI,
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP Tahun 2022 2. Lain-lain
Hadir Komisi X DPR RI	: 34 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Nadiem Anwar Makarim (Mendikbudristek RI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI secara virtual dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM./ **Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Berdasarkan surat Menkeu RI Nomor S-361/MK.02/2021 dan surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor No. B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021

tanggal 29 April 2021 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, Kemendikbudristek RI menyampaikan alokasi pagu indikatif pada RAPBN TA 2022 sebesar **Rp.73.082.867.097.000,-** (*Tujuh puluh tiga triliun delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Per Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu Indikatif
1	Rupiah Murni Operasional	17.744.866.328.000
2	Rupiah Murni NonOperasional	41.768.454.342.000
3	Rupiah Murni Pendamping	72.465.199.000
4	Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.376.793.951.000
5	Badan Layanan Umum	7.880.001.770.000
6	Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri	1.064.810.611.000
7	Surat Berharga Syariah Negara	2.175.474.896.000

Per Program

NO	Program	PAGU INDIKATIF
1	PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	10.218.277.127.000
2.	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	441.143.157.000
3	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	10.454.019.001.000
4	Pendidikan Tinggi	27.005.428.489.000
5	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.229.101.708.000
6	Dukungan Manajemen	19.911.814.967.000
7	Riset, Inovasi dan IPTEK	1.823.082.648.000
	TOTAL	73.082.867.097.000

2. Kemendikbudristek RI menyampaikan usulan tambahan anggaran **sebesar Rp.20.166.199.670.000,-** (*Dua puluh triliun seratus enam puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*), melalui surat No.32166/MPK.A/PR.05.04/2021 tentang Usulan Tambahan Anggaran Dalam Pagu Indikatif TA 2022 kepada Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI. Usulan tambahan ini diajukan agar program-program Merdeka Belajar seperti Kampus Merdeka, Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, serta SMK Pusat Keunggulan dapat dibiayai secara optimal.
3. Terhadap pagu indikatif Kemendikbudristek RI pada RAPBN TA 2022 sebagaimana tercantum pada angka II.1, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan:
 - a. Mendukung usulan tambahan anggaran Kemendikbudristek RI **sebesar Rp.20.166.199.670.000,-** (*Dua puluh triliun seratus enam puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dengan catatan penggunaannya untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, sebagai upaya pemulihan bidang pendidikan dan kebudayaan akibat pandemi Covid-19.
 - b. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk meningkatkan alokasi anggaran program dan kegiatan, antara lain, pendidikan karakter, PIP, KIP dan

- c. Mengingatkan Kemendikbudristek RI bahwa RKA K/L RKP TA 2022 harus mencerminkan pelaksanaan amanat undang-undang bidang pendidikan dan kebudayaan, antara lain, UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - d. Mengingatkan Kemendikbudristek RI untuk mengalokasikan anggaran kegiatan legislasi, terkait akan disampaikannya Naskah Akademik dan RUU Perubahan atas UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bulan Desember 2021.
4. Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan melakukan pendalaman materi rancangan RKA K/L dan RKP Tahun Anggaran 2022 dengan Eselon I Kemendikbudristek RI dalam waktu dekat dengan melengkapi data anggaran beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan dalam RAPBN TA 2022.
 5. Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat seluruh pandangan dan catatan yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI menjadi bahan rujukan dalam pembahasan dan pendalaman pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 11.55 WIB

MENDIKBUDRISTEK RI,



Nadiem Anwar Makarim

KETUA RAPAT



Agustina W. Pramestuti, SS., MM.